



Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penentu Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan

Dina Argarani*, Ratu Zakiyah Yusuf, Anas Malik

UIN Raden Intan Lampung

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v2i4.943>

*Correspondence: Dina Argarani

Email: dinaargarani2115@gmail.com

Received: 04-08-2025

Accepted: 12-09-2025

Published: 28-10-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *An extensive evaluation of the research on the significance of community empowerment in determining the success of sustainable development in rural Indonesia is presented in this essay. Scientific publications, government policy reports, and secondary data pertinent to the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goals 1 (No Poverty), 8 (Decent Work and Economic Growth), 11 (Sustainable Cities and Communities), 12 (Responsible Consumption and Production), and 17 (Partnerships for the Goals), comprise the reviewed literature. The thematic synthesis demonstrates how three aspects of sustainability are essentially strengthened by community empowerment: Environmental (by promoting eco-friendly behaviors and the circular economy), Economic (by maximizing local potential, particularly the function of BUMDes), and Social (through capacity building, substantive engagement, and social capital). There is a gap, though, as many studies continue to focus on the economic aspect without fairly incorporating the social and ecological aspects. In order to create autonomous, inclusive, and adaptable villages, this study provides policy implications and a research agenda to improve an empowerment approach based on participation, partnership, and digital transformation.*

Keywords: *Community Empowerment, Sustainable Development, Village, Participation, SDGs*

Abstrak: Penilaian komprehensif terhadap penelitian mengenai peran pemberdayaan masyarakat dalam menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di pedesaan Indonesia diuraikan dalam esai ini. Publikasi ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, dan data sekunder yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), dan 17 (Kemitraan untuk Tujuan), membentuk literatur yang ditinjau. Sintesis tematik menunjukkan bagaimana tiga aspek keberlanjutan diperkuat secara esensial melalui pemberdayaan masyarakat: Lingkungan (dengan mempromosikan perilaku ramah lingkungan dan ekonomi sirkular), Ekonomi (dengan memaksimalkan potensi lokal, khususnya fungsi BUMDes), dan Sosial (melalui pembangunan kapasitas, keterlibatan substansial, dan modal sosial). Namun, terdapat kesenjangan, karena banyak studi masih fokus pada aspek ekonomi tanpa memasukkan aspek sosial dan ekologi secara seimbang. Untuk menciptakan desa yang mandiri, inklusif, dan adaptif, studi ini memberikan implikasi kebijakan dan agenda penelitian untuk meningkatkan pendekatan pemberdayaan berbasis partisipasi, kemitraan, dan transformasi digital.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Desa, Partisipasi, SDGs

Pendahuluan

Isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi agenda global yang menuntut keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses pembangunan. SDGs mendorong seluruh negara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sosial serta pelestarian

lingkungan sebagai satu kesatuan sistem pembangunan global yang inklusif (Puspita, 2024). Tiga tujuan SDGs yang paling relevan dengan konteks pedesaan adalah SDGs ke-1 (*Tanpa Kemiskinan*), ke-8 (*Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*), dan ke-11 (*Desa dan Kota Berkelanjutan*), yang saling berkaitan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput (Saputri, 2021). Dalam konteks ini, desa berperan strategis sebagai garda terdepan pencapaian SDGs karena sebagian besar penduduk miskin dunia masih tinggal di wilayah pedesaan dan sangat bergantung pada sumber daya alam sebagai penopang hidupnya (Chambers, 1995).

Secara nasional, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian SDGs melalui kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam **Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020** tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Kebijakan ini menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik** (BPS, 2023), jumlah desa mandiri di Indonesia mencapai **11.456 desa**, meningkat tajam dibanding **1.734 desa pada tahun 2018**. Namun demikian, masih terdapat lebih dari **11.000 desa tertinggal** yang menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur, pendidikan, dan kapasitas ekonomi (BPS, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan: arah kebijakan nasional telah berpihak pada agenda berkelanjutan, tetapi implementasinya di tingkat pedesaan belum optimal karena lemahnya partisipasi masyarakat, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan lokal (Andari, 2021; Tanda, 2022).

Kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lapangan menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan top-down. Keberlanjutan pembangunan baru tercapai apabila masyarakat menjadi subjek aktif dengan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kuat. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi fundamental untuk memperkuat kemandirian desa, meningkatkan partisipasi kolektif, dan menjaga keseimbangan ekologi. Tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah (Zuliyah, 2010). Hal ini sejalan dengan pentingnya kapasitas sosial dalam pembangunan desa (Aisyah, 2023). Pemberdayaan menjadi mekanisme sosial untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal (Ulia, 2024).

Meskipun banyak penelitian mengkaji pemberdayaan masyarakat, sebagian besar masih terfokus pada aspek ekonomi semata. Pemberdayaan sering dipahami sebatas peningkatan pendapatan (Wijaya, 2010), sehingga dimensi sosial dan ekologis kurang disoroti. Penelitian lain juga mengaitkan pemberdayaan dengan pengentasan kemiskinan sebagai indikator utama keberhasilan (Arfianto & Balahmar, 2014). Padahal, orientasi yang terlalu ekonomi dapat mengabaikan kohesi sosial masyarakat (Sugiasuti & Pratama, 2022). Kondisi ini menyatakan bahwa pembangunan desa harus mencakup seluruh aspek keberlanjutan (Nur & Husen, 2022).

Pemberdayaan berbasis potensi lokal terbukti memberi dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan partisipasi sosial. Masyarakat yang diberdayakan mampu menjaga hutan secara kolektif (Damanik, 2019), sementara penguatan modal sosial menjadi faktor kunci keberlanjutan desa (Humanika et al., 2023a). Namun, sebagian besar

studi tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengaitkan pemberdayaan dengan kerangka Sustainable Development Goals. Pentingnya integrasi dengan SDGs 1, 8, 11, dan 17 dalam melihat keberhasilan pembangunan desa (Endah, 2020). Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan sinergis antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Masyarakat desa memiliki peran vital sebagai aktor utama pembangunan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai penggerak perubahan yang memahami konteks lokal dan potensi sumber daya (Rahman, 2015a). Melalui proses pemberdayaan, masyarakat memperoleh kapasitas untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan (Margayaningsih, 2016). Masyarakat yang berdaya cenderung lebih responsif terhadap isu sosial dan lingkungan (H. S. Nugroho, 2018). Pemberdayaan pada konteks ini menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara ekonomi, solidaritas sosial, dan kelestarian lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat desa juga berfungsi sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Masyarakat yang berdaya tidak lagi bergantung pada intervensi eksternal (Margayaningsih, 2016). Dalam konteks kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ekologis (Damanik, 2019). Hal tersebut sejalan dengan pentingnya pemberdayaan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan (Nurhayati, 2019). Pemberdayaan harus bersifat multi-dimensi untuk mencapai keberlanjutan desa (Nur & Husen, 2022).

Selain aspek sosial, kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi lokal. BUMDes mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa (Humanika, 2023). Konsep ini selaras dengan gagasan *community-based development* dari Tesoriero yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama sumber daya lokal (Tesoriero, 2009). Penguatan kelembagaan lokal mempercepat pencapaian SDGs Desa (Ulia et al., 2024). BUMDes memberi dampak nyata dalam pembentukan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun konsep pemberdayaan telah diarusutamakan dalam kebijakan pemerintah, implementasinya masih menyisakan sejumlah kesenjangan empiris. Penelitian sebelumnya lebih menekankan sisi ekonomi sehingga aspek sosial dan lingkungan sering terabaikan (Assajid et al., 2024; Nasfi, 2020). Di sisi lain, digitalisasi desa berpotensi memperkuat pemberdayaan melalui peningkatan akses informasi dan inovasi ekonomi digital (Mayyora et al., 2025). Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik desa (Aisyah, 2023). Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis komprehensif mengenai peran pemberdayaan dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pembangunan desa tidak akan berkelanjutan apabila masyarakat hanya menjadi objek kebijakan. Keberlanjutan tercapai ketika masyarakat memiliki kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal. Rahman menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan individu

dan kolektif (Rahman, 2015). Partisipasi merupakan inti dari pembangunan yang efektif (Zuliyah, 2010). Selain itu, pemberdayaan yang selaras dengan prinsip SDGs dapat memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang (Asdlori, 2023; Endah, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi literatur** untuk memahami secara mendalam hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan dinamika lokal yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan angka statistik. Kajian literatur dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah seperti jurnal penelitian, laporan kebijakan pemerintah, serta data sekunder yang relevan. Fokus analisis diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara tingkat pemberdayaan masyarakat, kapasitas lokal, dan keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Wilayah penelitian difokuskan pada konteks pedesaan Indonesia secara nasional dengan pertimbangan bahwa kesenjangan pembangunan antarwilayah masih cukup tinggi. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik** (BPS, 2024), jumlah desa mandiri mencapai 11.456 desa, sedangkan desa tertinggal masih berjumlah sekitar 12.000 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum sepenuhnya mencapai kemandirian sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan kapasitas lokal agar pembangunan dapat berkelanjutan dan berkeadilan.

Sumber dan jenis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi ilmiah. Sumber data utama berasal dari: Institusi Pusat Statistik (BPS, 2024), seperti Indeks Pembangunan Desa (2018) dan Statistik Potensi Desa Indonesia (2021); Ministerial Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); Dokumen resmi yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) Desa. Selain itu, penelitian ilmiah dari tahun 2010–2025, termasuk buku dan jurnal, digunakan untuk meningkatkan pemeriksaan teoritik dan konseptual terkait hubungan antara pemberdayaan masyarakat, partisipasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Teknik Analisa Data

Tiga tahapan utama digunakan untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif pada data:

1. Reduksi data—mencari data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penyajian data—Data disusun menjadi uraian naratif untuk menunjukkan pola hubungan antarvariabel sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi—menafsirkan data yang disajikan untuk mendapatkan pemahaman konseptual tentang bagaimana pemberdayaan, keterlibatan, dan keberlanjutan pembangunan berhubungan.

Validitas dan Reliabilitas

1. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas penelitian ini, langkah-langkah berikut diambil:
2. Menggunakan perbandingan data dari berbagai lembaga resmi (BPS, Kemendes PDTT, dan dokumen SDGs) untuk menganalisis sumber.
3. Hanya menggunakan literatur ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau buku akademik berkualitas tinggi untuk mengevaluasi kredibilitas referensi.

Konsistensi analisis dilakukan dengan membandingkan hasil interpretasi dari berbagai sumber data sekunder untuk memastikan bahwa temuan tetap objektif dan tidak bias.

Hasil dan Pembahasan

Dimensi social, kapasitas partisipasi dan modal sosial

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat desa adalah proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat sehingga mereka dapat mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui tahapan seperti menentukan potensi, meningkatkan kapasitas, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal seperti **BUMDes** dan kelompok usaha berbasis kolaborasi. Konsep pembangunan partisipatif sejalan dengan model ini. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan daripada hanya penerima manfaat (Wijaya, 2010b). Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan daripada hanya penerima manfaat.

Karena mencakup peningkatan kemampuan individu dan kolektif, partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan, dan penguatan modal sosial melalui norma kerjasama dan kepercayaan, dimensi sosial pemberdayaan menjadi komponen yang sangat penting dalam kerangka tersebut. Mekanisme ini menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan, yang membuat implementasinya lebih berkelanjutan dan tepat sasaran. Praktik pemberdayaan mendorong masyarakat desa untuk mengidentifikasi masalah, membangun solusi lokal, dan memperkuat jejaring kerja sama antarwarga dan lembaga desa. Mekanisme sosial ini bukan hanya ide. Penelitian (Margayaningsih, 2016b) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi produktif yang bergantung pada sumber daya lokal, sekaligus mempertegas bahwa dimensi sosial dalam pemberdayaan merupakan dasar bagi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dimensi Ekonomi: Optimalisasi Potensi Lokal dan BUMDes

Salah satu aspek ekonomi pemberdayaan masyarakat desa adalah meningkatkan kelembagaan ekonomi desa, terutama **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**, untuk memaksimalkan potensi lokal. Organisasi ini membantu penyerapan tenaga kerja, memperkuat rantai nilai lokal, dan memperluas bisnis yang berbasis sumber daya desa. Praktik yang baik di berbagai daerah menunjukkan bahwa kombinasi pertanian

berkelanjutan, **pariwisata komunitas, dan UMKM** lokal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengembangkan **pertanian organik, sistem pengelolaan sampah terpadu, dan ekonomi sirkular**, pemberdayaan desa dapat mencapai inovasi dalam pengelolaan potensi alam dan sumber daya manusia.

(Zuliyah, 2010) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus dimulai dengan mengajarkan orang-orang bagaimana memanfaatkan potensi lokal secara kreatif dan bekerja sama. Metode ini telah terbukti efektif di banyak desa, di mana mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi mereka sendiri tanpa bergantung terlalu banyak pada dana transfer pemerintah. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada meningkatkan pendapatan tetapi juga meningkatkan **kesadaran akan tanggung jawab sosial** dan lingkungan dalam praktik pembangunan.

Dampak pemberdayaan masyarakat terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan terbukti signifikan. Secara sosial, pemberdayaan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan memperkuat solidaritas komunitas. Secara ekonomi, keberadaan BUMDes berperan sebagai **motor pertumbuhan ekonomi desa**, sebagai mana ditemukan oleh (Humanika et al., 2023) bahwa unit usaha desa memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja lokal sambil meningkatkan akses permodalan dan peluang bisnis produktif. Dalam hal lingkungan, pemberdayaan mendorong praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan air bersih, energi terbarukan, dan konservasi lahan. Ini berkaitan dengan pencapaian **SDGs 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) dan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan)**. Pendekatan integratif menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat terjadi jika pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas sosial bekerja sama dengan baik. Akibatnya, dimensi ekonomi pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Dimensi lingkungan: praktik ramah lingkungan dan ekonomi sirkular

Dalam pemberdayaan masyarakat, aspek lingkungan sangat diperhatikan. Praktik ramah lingkungan seperti pertanian organik, pengelolaan sampah terpadu, konservasi lahan dan air, dan pemanfaatan energi terbarukan sangat penting. Dengan menerapkan kerangka ekonomi sirkular dan hijau, desa dapat mempertahankan daya dukung ekosistem sambil menghasilkan nilai ekonomi baru yang berbasis keberlanjutan.

Secara empiris, terbukti bahwa penerapan ide ini berhasil di beberapa desa di Indonesia. Misalnya, Desa Ponggok di Jawa Tengah berhasil mengembangkan pariwisata air berbasis BUMDes, meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan. Di sisi lain, Desa Pujon Kidul di Jawa Timur berhasil mengintegrasikan pariwisata dan pertanian melalui ekowisata (Karim, 2020). Selain itu, **digitalisasi desa** turut memperkuat tata kelola pembangunan dan transparansi keuangan. (Mayyora et al., 2025) menunjukkan bahwa perubahan digital meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap informasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi dan lingkungan sangat penting untuk mempercepat pencapaian **SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)**. Oleh karena itu, aspek lingkungan dari pemberdayaan masyarakat tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga membangun dasar ekonomi dan kelembagaan desa yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan.

Tantangan implementasi

Sampai saat ini, banyak masalah yang kompleks masih dihadapi saat menerapkan pemberdayaan masyarakat desa. Selain ketergantungan yang besar pada dana transfer pemerintah, ketimpangan kapasitas antara aparatur dan masyarakat, dan kelemahan sistem data dan pemantauan yang menghambat evaluasi keberhasilan program, beberapa tantangan utama muncul. Selain itu, banyak program pemberdayaan berjalan secara sektoral dan tidak berkelanjutan karena kurangnya integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai hasil dari berbagai penelitian, sulit untuk menentukan seberapa efektif program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar program hanya berhenti pada tahap deskriptif tanpa melakukan evaluasi dampak yang menyeluruh. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa yang lebih kontekstual dan partisipatif harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

(Assajid et al., 2024) menekankan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis SDGs Desa harus diterapkan, dengan fokus pada kerja sama antara komunitas lokal, sektor swasta, dan pemerintah. Untuk mencapai hal ini, aparatur desa harus diperkuat, tata kelola harus lebih jelas, dan kelembagaan ekonomi lokal harus dibangun dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi sebagai komponen penting dalam membangun desa yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing berdasarkan prinsip pembangunan berkeadilan.

Peran Kemitraan dan Digitalisasi

Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan dan memperluas sumber daya. Kolaborasi antara berbagai pihak memungkinkan pertukaran pengetahuan, pendampingan teknis, dan bantuan keuangan, yang membantu masyarakat desa menjadi lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi. Sektor swasta mendukung penguatan rantai nilai dan akses pasar produk desa, sementara perguruan tinggi berkontribusi pada riset dan pengembangan teknologi tepat guna.

Sebaliknya, transformasi digital desa telah berkontribusi pada pembentukan tata kelola yang jelas dan efektif. Digitalisasi meningkatkan akuntabilitas keuangan dan layanan publik serta memberi pelaku UMKM desa akses pasar melalui platform daring dan sistem informasi terpadu. Digitalisasi, di sisi lain, sangat bergantung pada literasi digital masyarakat. Digitalisasi meningkatkan akuntabilitas keuangan dan layanan publik serta

memberi pelaku UMKM desa akses pasar melalui platform daring dan sistem informasi terpadu. Namun, digitalisasi sangat bergantung pada literasi digital masyarakat dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang merata dan inklusif. Oleh karena itu, untuk memberi seluruh lapisan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses transformasi ini, pengembangan kapasitas digital dan perluasan jaringan internet desa harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dua pilar utama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pembentukan desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan adalah kerja sama yang sinergis dan digitalisasi yang inklusif.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor kunci dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang pendidikan. Kesuksesan pembangunan desa telah beralih dari pendekatan top-down menjadi model partisipatif yang memperkuat kohesi sosial melalui peningkatan potensi manusia, pengembangan organisasi lokal, dan keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan desa saat ini tidak hanya hasil dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemajuan sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kesediaan komunitas untuk bekerja sama dalam memaksimalkan potensi lokal. Diperkirakan bahwa ketika pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas ekonomi lokal, seperti usaha mikro, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata berbasis komunitas, hal ini tidak hanya menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan tetapi juga meningkatkan kesadaran akan lingkungan dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.

Tiga implikasi kebijakan penting dapat ditarik dari temuan ini. Pertama, untuk mengembangkan kemandirian ekonomi yang adaptif, Dana Desa sebaiknya lebih difokuskan pada inisiatif yang meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi regional seperti BUMDes dan asosiasi usaha, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Kedua, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, inisiatif pemberdayaan harus dirancang secara holistik dengan menggabungkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menghindari pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Ketiga, digitalisasi desa yang inklusif untuk meningkatkan akuntabilitas dan akses pasar bagi UMKM desa, serta kolaborasi sinergis (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 17) antara pemerintah, lembaga akademik, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat kritis bagi keberlanjutan pembangunan.

Saran

Peneliti di masa depan sebaiknya fokus pada penilaian dampak kuantitatif program pemberdayaan terintegrasi (sosio-ekonomi-ekologis) terhadap indikator SDG tertentu di tingkat desa berdasarkan celah empiris dan teoretis yang ditemukan, sehingga temuan tidak hanya bersifat deskriptif. Menganalisis model kolaborasi kreatif yang paling sukses dalam mendorong transformasi digital dan adopsi ekonomi sirkular di tingkat desa juga sangat penting. Penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan

membantu komunitas pedesaan menjadi lebih tangguh terhadap tekanan gangguan ekonomi modern dan perubahan iklim.

References

- (BPS), B. P. S. (2021). *Statistik Potensi Desa Indonesia*. BPS RI.
- (BPS), B. P. S. (2023). *Jumlah Desa Mandiri di Indonesia*. BPS RI.
- (BPS), B. P. S. (2024). *Jumlah Desa Mandiri dan Tertinggal 2023–2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzNCMy/jumlah-desa-mandiri.html>
- Abbas, M. A. Y., Borahima, B., & Chakim, M. H. R. (n.d.). *Ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan*. -.
- Aisyah, N. N. (2023). Analisis Penyebab Serta Dampak Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Beserta Solusi Untuk Mengatasinya. *Proceedings Series of Educational Studies*, 231–234.
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137–139.
- Arfianto, & Balahmar. (2014). Penguatan Ekonomi Lokal sebagai Indikator Pemberdayaan. *Jurnal ...*
- Asdlori, A. (2023). Pendidikan Islam sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Peran Sistem Pendidikan Pesantren dalam Implementasi SDGs. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 124–130.
- Assajid, S., Khoiron, K., & Sekarsari, R. W. (2024). Kebijakan pembangunan berkelanjutan desa: Langkah strategis pemenuhan SDGs Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 170–180.
- Bihamding, H. (2020). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Dahlan, R. (2022). *Ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan*. Jejak Pustaka.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023a). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101–116.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023b). Peran BUMDes dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo*, 8(2), 101–116.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Pearson Education.
- Karim, A. (2020). Peningkatan Ekonomi Pedesaan dalam Menunjang Pergerakan

- Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Masa Pandemic Global. *Online Journal*.
<https://bit.ly/3iKMIr0>
- Margayaningsih. (2016a). Pemberdayaan Masyarakat Desa: Perspektif Sosial dan Ekonomi. *Jurnal ...*
- Margayaningsih, D. I. (2016b). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158–190.
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi Digital Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Literature Review. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100–111.
- Nasfi, N. (2020). Pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 54–66.
- Nugroho, H. S. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Journal of Governance*, 3(1).
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Perbandingan, praktik, dan ideal*. Elex Media Komputindo.
- Nur, M. S., & Husen, A. (2022). Penerapan Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35–49.
- Nurhayati, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 95–111.
- Puspita, D. (2024). Energi Bersih dan Terjangkau dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(3), 271–280.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman. (2015a). Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Partisipasi. *Jurnal ...*
- Rahman, K. (2015b). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *WEDANA*, 1(2), 189–199.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Saputri, W., Andryan, W., & Khodijah, D. P. I. (2021). Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030: Zero Hunger (Goal 2). *Ilmu Kelautan Dan Perikanan*, 4–14.
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(1), 79–90.
- Suharto, E. (2006). *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Susiana, S. (2015). *Pembangunan berkelanjutan: Dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika.
- Tanda, T. S., Taufik, T. R., & Yuniarto, Y. H. (2022). Manajemen Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa) Dimulai dari Penyusunan Peraturan Desa SDGs Desa. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 2(2), 54–66.
- Tesoriero, F. (2009). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Ulia, A. R., Rayyan, S., & Ratnawati, E. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi

Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat Dengan Redistribusi Pendapatan Nasional. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8090–8099.

Wijaya. (2010a). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal ...*

Wijaya, M. (2010b). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Journal of Rural and Development*, 1(1).

Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Kencana.

Zuliyah, S. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2).